



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERRY PURNAMA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 220762

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.550.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/180 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI	Rp. 2.100.000.000	
2. Tanah Seluas 410 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, WARISAN	Rp. 150.000.000	
3. Tanah Seluas 533 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, WARISAN	Rp. 125.000.000	
4. Tanah Seluas 1554 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, WARISAN	Rp. 175.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	333.000.000
1. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp. 6.000.000	
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER / MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp. 323.000.000	
3. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2010, HASIL SENDIRI	Rp. 4.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	55.211.500
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	40.700.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.978.911.500



III. HUTANG

Rp. 383.750.006

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.595.161.494

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.